

## ABSTRAK

Tujuan penelitian : untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistic. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian hukum klinis (*Clinical Legal Research*), Metode Penyajian Data, Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Metode Analisis Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif,

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pmerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat melakukan perekrutan pegawai non pegawai negeri khususnya pramubakti. Pihak pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam perjanjian kerja tersebut, tugas dan fungsinya mengacu pada peraturan yang berlaku yang sama dengan pegawai negeri sipil lainnya. Apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan maka akan diberikan sanksi yang tercantum dalam perjanjian tersebut.2). Hambatan yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A terbatasnya anggaran untuk pegawai honorer yang berasal dari Non DIPA, hal ini tetap dilakukan dikarenakan kurangnya pegawai dalam membantu kinerja ASN Pegawai Negeri Sipil

*Kata kunci : Perlindungan hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri*

## ABSTRACT

*The purpose of the study: to determine the legal protection of non-civil servant government employees and the obstacles faced in the legal protection of non-civil servant government employees (Overview of the work agreement of non-civil servant government employees in the Cilacap Religious Court Class 1A)*

*The approach method used in this research is normative juridical, namely an approach that uses a positivist legislative conception. The research specification uses clinical legal research (Clinical Legal Research), Data Presentation Method. The data that has been collected is then recorded based on its relevance to the subject matter to be studied as a unified whole and systematically. Analysis Methods The data obtained will be analyzed using qualitative normative methods,*

*Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: 1). Legal Protection of Non-Civil Servant Government Employees at the Cilacap Religious Court Class 1A, based on the Decree of the Secretary of the Supreme Court Number 811/SEK/SK/VII/2021 dated August 19, 2021 concerning the Management of Non-Civil Servant Government Employees at the Supreme Court and the Judicial Body under it can recruiting non-civil servant employees, especially pramubakti. The non-civil servant government employee in the work agreement, his duties and functions refer to the same applicable regulations as other civil servants. If you violate the obligations and prohibitions, you will be given sanctions as stated in the agreement. Barriers faced in the legal protection of non-civil servant government employees at the Cilacap Religious Court Class 1A, the limited budget for honorary employees from Non-DIPA, this is still being done due to the lack of employees in helping the performance of ASN Civil Servants*

*Key words: Legal protection of non-civil servant government employees*

